



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI**  
Jl. G Obos No.147 RT.002 RW.007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya  
Telepon/Fax. (0536) 3235158 Fax : (0536) 3235158 E-mail : bpkh21@gmail.com

---

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
DAN TATA LINGKUNGAN  
WILAYAH XXI PALANGKA  
TAHUN 2024**

Palangka Raya, Januari 2025

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun sebagai evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan XXI Palangka Raya selama tahun 2024 sebagai penyelenggara program pemerintah di bidang keplanologian dan tata lingkungan yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Dengan berakhirnya pelaksanaan DIPA kegiatan tahun 2024, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya telah menyelesaikan kegiatannya dan merupakan implementasi tahun kelima (5) dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024. Renstra ini berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang telah disempurnakan yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam upaya memenuhi tujuan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.



Palangka Raya, 15 Januari 2025  
Kepala Balai,

Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P  
NIP. 19800125 200501 1 008

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
C. Sumber Daya Manusia .....	6
D. Permasalahan utama ( <i>strategic issues</i> ) .....	7
II. PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 .....	8
B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 .....	12
C. Perjalanan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) .....	13
D. Perjanjian Kinerja .....	14
E. Pohon kinerja .....	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
A.1. Analisis pembahasan dengan membandingkan antara target dan Realisasi kinerja .....	29
A2. Analisis pembahasan dengan membandingkan realisasi kinerja- serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa- tahun terakhir .....	29
A3. Analisis pembahasan dengan membandingkan realisasi kinerja- sampai dengan tahun ini dengan target Renstra .....	30
A4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar – Nasional .....	30
A5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	31
A6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	31
A7. Menyajikan informasi keuangan setiap sasaran kinerja instansi ..	35
A8. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau- Pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	35
A9. Menguraikan outcome atau dampak penting atas capaian kinerja setiap sasaran .....	36
A10. Menyajikan upaya perbaikan ke depan .....	38
A11. Dukungan terhadap Prioritas Nasional .....	39

	B. Realisasi Anggaran .....	40
	C. Penghargaan Atas Prestasi Kinerja .....	41
IV.	PENUTUP .....	42
V.	LAMPIRAN .....	
	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan menjadi bagian dari penopang tercapainya prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam hal alokasi sumber daya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktivitas pembangunan nasional.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh disetiap sektor pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dilakukan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan dalam rangka penataan Kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ditingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Balai Pejabat Administrator (Eselon IIIa) dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pengawas (Eselon IVa) yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan dan Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; serta Kelompok Jabatan Fungsional. BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis, BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam kesempatan berusaha, pendapatan negara secara nyata di bidang perencanaan kehutanan dan penataan lingkungan, serta dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam RENSTRA tahun 2020-2024 yang berisi target dan indikator outcomes yang harus dicapai selama 5 tahun yang dijabarkan dalam RENJA untuk target serta indikator yang hendak dicapai pada tahun 2024 dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;

- h. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- l. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Penjabaran uraian tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
- b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan

hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

- c. Seksi Informasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan** tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Struktur BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya dapat dilihat pada Gambar 1.



### C. Sumber Daya Manusia

Deskripsi Sumber Daya Manusia pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya tahun 2024 berjumlah 55 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 32 orang, PPPK sebanyak 13 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 10 orang.

Tabel.1 Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan s/d 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2024				
		a	b	c	d	Jml
1	Golongan IV	3	1	-	-	4
2	Golongan III	11	4	1	8	28
3	Golongan II	-	-	2	1	4
4	Golongan I	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>						<b>32</b>

Tabel.2 Deskripsi PPPK Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2024

No	Uraian	2024		
		KH	NK	JML
1.	Pasca Sarjana	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	3	3	6
3.	Diploma III	3	-	3
4.	Diploma I	-	-	-
5.	SLTA	4	-	4
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>13</b>

Keterangan : KHL = Kehutanan NK = Non Kehutanan

Tabel.3 Deskripsi PPNPN Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2024

No	Uraian	2024		
		KH	NK	JML
1.	Pasca Sarjana	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	-	3	3
3.	Diploma III	-	-	-
4.	Diploma I	-	-	-
5.	SLTA/ SMK Kehutanan	-	7	7
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>10</b>

Keterangan : KH = Kehutanan NK = Non Kehutanan

#### D. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Wilayah kerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya meliputi 1 (satu) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035 dari luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 ha dan selanjutnya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.529/Kpts-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta perkembangan pengukuhan

kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah luas kawasan hutan adalah 11.931.843,60 ha atau 77,62 % dari luas daratan, sesuai peta rupa bumi Indonesia.

Permasalahan utama yang dihadapi BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada areal yang sangat luas tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik tenaga teknis maupun administrasi serta masih tingginya konflik tenurial pada kawasan hutan baik dengan masyarakat maupun dengan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan.

## **II. PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024**

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan kurun waktu Tahun 2020-2024, BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Pemantapan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang merupakan kumpulan program intervensi yang harus menjadi bagian dari seluruh kegiatan teknis di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Program intervensi yang akan dikembangkan meliputi :

1. Intervensi Kebijakan

Kebijakan/regulasi/peraturan/NSPK yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

2. Intervensi Sumber Daya Manusia

Program pengembangan SDM (kualitas dan kuantitas) yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

3. Intervensi Teknologi

Teknologi yang diperlukan untuk mempermudah atau sebagai syarat pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

4. Intervensi Anggaran

Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

5. Intervensi Kemitraan

Program pelibatan para pihak dan pengembangan kemitraan para pihak untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

Renstra BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024 (Revisi I) yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 (Revisi I) yang mana sebagai alat dalam penetapan target dan

pemantauan implementasi kegiatan. Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian rencana strategis ini menjadi acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya ini, diharapkan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan selama 5 (lima) tahun dapat lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud untuk pendukung pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4. Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									
		Penataan Batas Kawasan Hutan (regular)	Km	1.449	3.157	2.430	6.422		13.458
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA dalam Kawasan Hutan	Ha	13.273,4	-	-	-	117.966,3	131.239,7
		Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA	Km	-	-	326	256	-	582
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Inventarisasi Potensi Sumber daya Hutan	Klaster	10	5	-	1	30	46
		Ground Cek Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	Lokasi	2	2	4	4	4	16
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan									
	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Lap	1	1	1	1	1	5

Pencegahan Dampak Lingkungan									
	Tersedianya data dan Informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif	Dok	1	1	-	-	-	2
		Fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor	Layanan	-	-	-	1	1	2
		Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan	layanan	-	-	-	1	1	2
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									
		Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin	79	80	81	82	83	
		Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level	3	3	3	3	4	
		Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dok.	1	1	1	1	1	

## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya pada tahun anggaran 2024 mendapatkan pagu anggaran **Rp. 48.322.936.000,-** (*Empat puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) dengan ada blokir pagu sebesar **Rp. 400.000.000,-** (*Empat Ratus Juta Rupiah*). Pagu anggaran efektif tahun 2024 **Rp. 47.922.936.000,-** (*Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Target sasaran kegiatan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024

PPK/Kegiatan	Rencana Kegiatan	
	Pagu ( Rp.)	Output
PPK TU		
- Layanan Perkantoran	6,878,558,000	1 Layanan
- Layanan Umum	700,000,000	1 Layanan
- Layanan Saran dan Prasarana Internal (Belanja Modal)	832,400,000	39 Unit
<b>Total PPK TU</b>	<b>8,410,958,000</b>	
PPK PPKH		
- Inventarisasi, Verifikasi, dan BATB Obyek TORA	33,741,187,000	1 Rekomendasi Kebijakan
- Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	134,657,000	1 Rekomendasi Kebijakan
<b>Total PPK PPKH</b>	<b>33,875,844,000</b>	
PPK ISDHL		
- Layanan Tata Lingkungan PDLKWS	282,656,000	1 Layanan
- Layanan Tata Lingkungan PDLUK	581,252,000	1 Layanan
- Enumerasi	1,817,480,000	30 Klaster
- Penafsiran Citra Satelit	94,920,000	1 Layanan
- Verifikasi PNBP	2,859,826,000	121 Badan Usaha
<b>Total PPK ISDHL</b>	<b>5,636,134,000</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>47,922,936,000</b>	

### C. Perjalanan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Dalam mendukung program bidang keplanologian dan tata lingkungan tahun 2024, BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya telah menyusun Rencana Kerja Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024 sebagai acuan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Wilayah XXI Palangka Raya telah merencanakan kegiatan dan target kegiatan Tahun 2024 dengan pagu anggaran **Rp. 48.322.936.000,-** (*Empat puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) dengan ada blokir sebesar **Rp. 400.000.000,-** (*Empat Ratus Juta Rupiah*), sehingga anggaran efektif tahun 2024 sebesar **Rp. 47.922.936.000,-** (*Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 029.06.2.145160/2024 tanggal 24 November 2023. Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, telah terjadi perubahan anggaran dengan kronologis sebagai berikut :

Tabel 6. Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

NO.	REVISI	PAGU	TANGGAL REVISI	KETERANGAN REVISI
1	DIPA AWAL	55.814.353.000	-	DIPA Awal
2	REVISI KE 1	55.814.353.000	17 – 02 - 2024	Self Blokir Kegiatan Lingkungan Hidup (Belum ada kesepakatan TM untung Bidang Lingkungan Hidup)
3	REVISI KE 2	55.814.353.000	16 – 03 - 2024	Revisi Halaman III DIPA
4	REVISI KE 3	55.814.353.000	24 – 04 - 2024	Pembukaan Tanda Blokir Kegiatan Lingkungan Hidup
5	REVISI KE 4	55.814.353.000	29 – 05 - 2024	Revisi Halaman III DIPA
6	REVISI KE 5	54.600.541.000	09 – 07 - 2024	Penghematan anggaran belanja barang pada kegiatan teknis sebesar Rp. 1.213.812.000
7	REVISI KE 6	45.898.415.000	08 – 09 - 2024	Penghematan anggaran belanja barang pada kegiatan teknis sebesar Rp. 8.702.126.000



8	REVISI KE 7	48.569.649.000	02 – 09 - 2024	Penambahan Pagu Anggaran di Kegiatan Teknis sebesar Rp. 2.671.234.000
9	REVISI KE 8	48.925.649.000	19 – 09 - 2024	Penambahan Pegu anggaran pada belanja Pegawai sebesar Rp.356.000.000
10	REVISI KE 9	49.001.436.000	22 – 10 - 2024	Penambahan Pegu anggaran pada belanja Pegawai sebesar Rp.75.787.000
11	REVISI KE 10	48.322.936.000	31– 10 - 2024	Penghematan anggaran belanja barang pada kegiatan teknis sebesar Rp. 678.500.000
12	REVISI KE 11	48.322.936.000	08 – 11 - 2024	Revisi Halaman III DIPA
13	REVISI KE 12	48.322.936.000	12 – 11 - 2024	Self Blocking Perjalanan Dinas (Pencatatan di Halaman IV.A DIPA)
14	REVISI KE 13	48.322.936.000	04 – 12 - 2024	Revisi Halaman III DIPA

#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya selaku penerima amanah dan kesepakatan, akan mempertanggungjawabkan penugasan itu kepada Direktur Jenderal PKTL selaku pemberi amanah dan kesepakatan. Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PKTL (pemberi amanah dan kesepakatan) dengan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya (penerima amanah dan kesepakatan) Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 7 dan Lampiran 1.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
				SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1	1	Layanan
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1	1	Layanan
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	30	30	Layanan
			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
3.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	31	121	Unit
3.	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	1	1	Layanan
		Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Provinsi
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80	80	Poin
			Level Maturitas SPII Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen
		Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	98,29	82,5	Poin

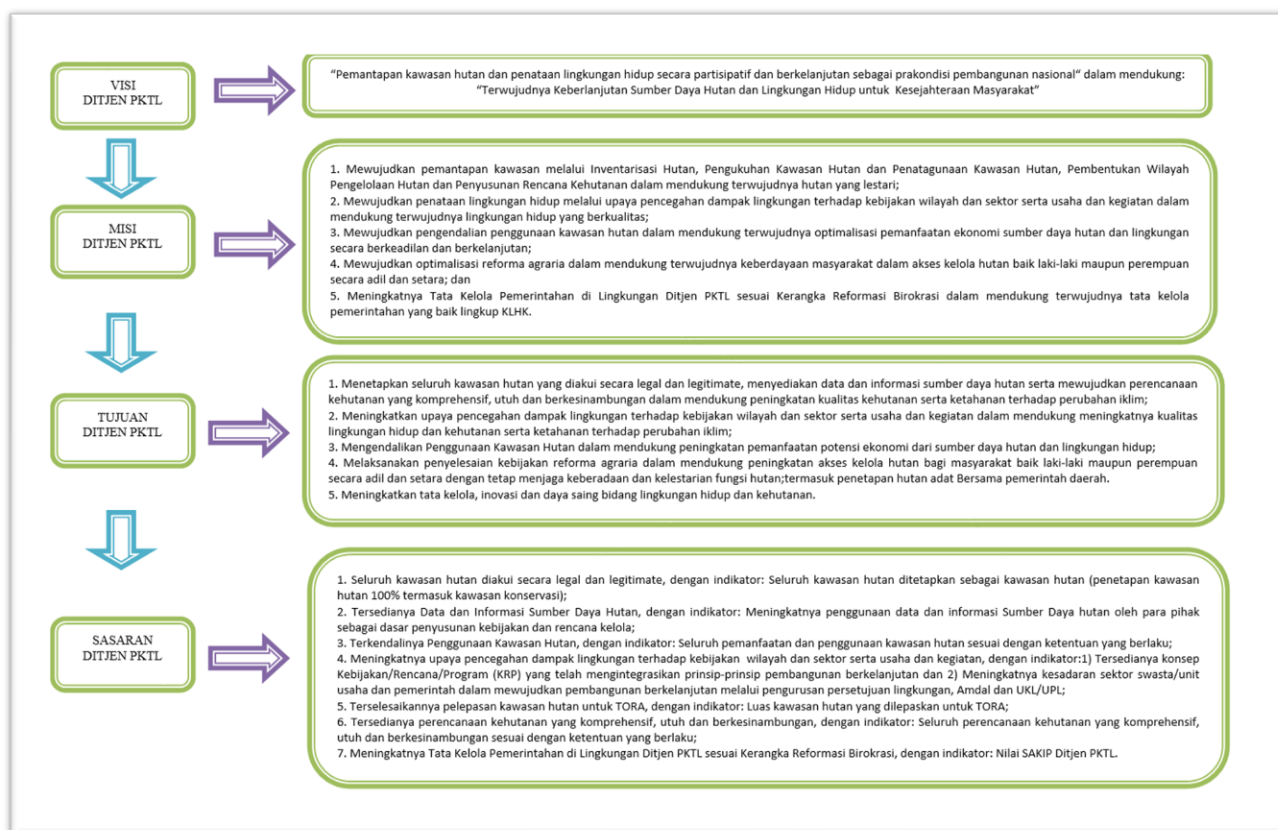
KRO	Rincian Output (RO)	Target RO			Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5436. Pencegahan Dampak Lingkungan						
5436.QAH Pelayanan publik lainnya	002. Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan	400.000.000	354.503.000
	003. Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan	700.000.000	621.497.000
5433. Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan						
5433.PBV Kebijakan Bidang Kehutanan	001. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	43.796.970.000	33.741.187.000
	002. Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	150.000.000	134.657.000
5434. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan						
5434.BMA Data dan Informasi Publik	002. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	30	30	Layanan	1.817.480.000	1.817.480.000
	003. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan	94.920.000	94.920.000
6744 Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan						
6744.BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	6744.BAC.001 Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	31	121	Badan Usaha	1.155.000.000	3.147.734.000

5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
5432.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	1	1	Layanan	700.000.000	700.000.000
	994. Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	6.167.583.000	6.878.558.000
5432.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951. Layanan Sarana Internal	39	39	Unit	832.400.000	832.400.000
	971. Layanan Prasarana Internal	-	-	Unit	-	-
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>55.814.353.000</b>	<b>48.322.936.000</b>
<b>TOTAL BLOKIR</b>					<b>1.100.000.000</b>	<b>400.000.000</b>

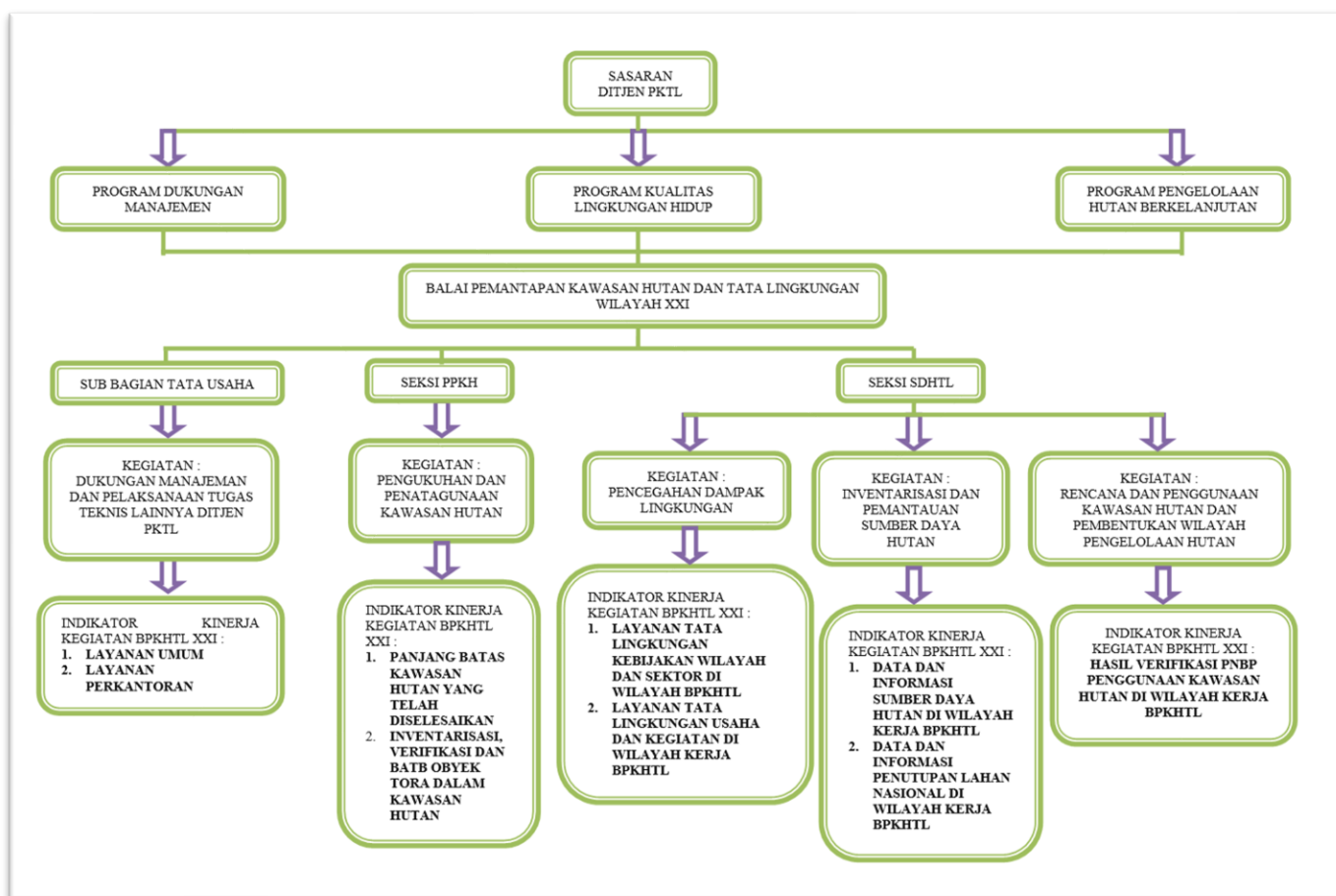
## E. Pohon Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (*logic model*) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan.

Gambar 2. Visi Misi Direktorat Jenderal PKTL



Gambar 3. Pohon Kinerja BPKHTL XXI Palangka Raya



### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja, meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.
2. Pengukuran kinerja, meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, membandingkan realisasi dengan rencana kerja, kinerja tahun sebelumnya.
3. Pelaporan kinerja, berupa pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dengan format standar laporan yang telah ditetapkan (rinci dengan berbagai indikator dan capaiannya);
4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan.

Capaian kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024 dilaporkan untuk setiap indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sepanjang Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kegiatan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024 terdiri atas program pengelolaan hutan berkelanjutan, program kualitas lingkungan hidup, dan program dukungan manajemen. Program dimaksud dilaksanakan oleh masing-masing sub bagian dan seksi dan terbagi habis kepada seluruh pegawai, diimana kegiatan dimaksud menjadi sasaran kinerja pegawai yang tertuang dalam Dokumen SKP tahun 2024. Secara rinci sasaran dan kegiatan tahun 2024 sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikan nya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan	Layanan	1	1
			Terselesaikan nya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH	Provinsi	1	1
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkan nya data dan informasi sumber daya hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Re-Enumerasi PSP	Klaster	30	30
				Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional, termasuk groundcheck (pengecekan lapangan)	Layanan	1	1
		Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBPN penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan dan Evaluasi PPKH di Wilayah Kerja BPKHTL	Verifikasi PNBPN dan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Unit	121	121
2	Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Layanan	1	1
			Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan	Layanan	1	1
3	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PKTL	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Nilai SAKIP Ditjen PKTL/BPKHTL XXI	Poin	80	80,23
				Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3
				Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1
			Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Ditjen PKTL	Nilai Kinerja Anggaran pada Ditjen PKTL	Nilai Kinerja Anggaran pada Ditjen PKTL/BPKHTL XXI	Poin	82,5	91,84

Untuk setiap capaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya sebagai berikut :

#### A.1. IKK Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyelesaian penetapan Kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah, Pagu anggaran tersedia untuk penyelesaian IKK ini adalah sebesar Rp. 134.657.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 134.628.085,- atau mencapai 99,98%. Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9. Usulan Desain Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2024

No	Nama Kelompok Hutan	Luas sisa penetapan (Ha)	Keterangan	Nomor Register
1	HP S. Kahayan	70,357.89	Seluas 53.087,08 Ha sudah diusulkan pada tahun 2023 dan belum ditetapkan. Seluas 17.270,81 Ha sudah diusulkan pada tahun 2024.	62009
2	HPT S. Manjul - S. Salau	7,123.87	Areal penetapan berkurang karena pelepasan parsial untuk TORA Kabupaten Lamandau (SK Nomor 455 Tahun 2024)	62030
3	HP S. Manjul - S. Salau	2,330.09	Usulan desain penetapan tahun 2024	62031
4	HP S. Segintung	1,778.13	Usulan desain penetapan tahun 2024	62042
5	SM Lamandau	8,438.99	Seluas 7.831,48 Ha sudah diusulkan pada tahun 2023 dan belum ditetapkan. Seluas 604,51 Ha sudah diusulkan pada tahun 2024	62043
6	KSA S. Kahayan	1,376.83	Usulan desain penetapan tahun 2024	62044
7	HP S. Kapuas	15,472.78	Usulan desain penetapan tahun 2024	62049
8	HPK S. Kapuas	97,326.37	Usulan desain penetapan tahun 2024	62050
9	HL S. Sebangau	111.03	Usulan desain penetapan tahun 2024	62054
10	Kelompok HL - HPT S. Kahayan	5,387.09	Usulan desain penetapan tahun 2024	62056
11	HPT-HP S. Lamandau	93,680.25	Seluas 5.709,85 Ha dengan penetapan KH Sungai Jelai Hulu Sungai Pawan Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Usulan desain penetapan tahun 2024	62058
12	HPT-HP S. Barito	326,741.99	Seluas 7.996,17 Ha dengan penetapan KH Sungai Ratah - Sungai Nyuatan - Sungai Lawa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Usulan desain penetapan tahun 2024	62059
13	HPK S. Mendawai - S. Mentaya	466,314.99	Seluas 278.780,27 Ha sudah diusulkan pada tahun 2023 dan belum ditetapkan. Seluas 187.534,72 Ha sudah diusulkan pada tahun 2024	62065
14	HP S. Mendawai Mentaya	74,341.23	Seluas 35.459,61 Ha sudah diusulkan pada tahun 2023 dan belum ditetapkan. Seluas 38.881,62 Ha sudah diusulkan pada tahun 2024	62066
15	HL S. Lamandau	8,740.87	Usulan desain penetapan tahun 2024	62068
16	HP Pulau Samuda	85.01	Usulan desain penetapan tahun 2024	62070
17	HPT-HP S. Mendawai	121,332.37	Usulan desain penetapan tahun 2024	62071
18	HPK Barat S. Rungan	5,631.43	Usulan desain penetapan tahun 2024	62072
19	HPK S. Lamandau	211.13	Usulan desain penetapan tahun 2024	62073
20	HPK S. Barito	353,222.45	Usulan desain penetapan tahun 2024	62074
21	HPK S. Kahayan	201,184.91	Usulan desain penetapan tahun 2024	62075
22	HPK S. Misin	11,992.99	Usulan desain penetapan tahun 2024	62076
23	HPT S. Kahayan	2,956.64	Usulan desain penetapan tahun 2024	62077
24	HPT-HP S. Seruyan	35,343.06	Usulan desain penetapan tahun 2024	62078
25	Kebun Raya Sampit	570.40	Usulan desain penetapan tahun 2024	62079
26	Kel. HL-HPT S. Misin II (Murung Raya)	90,215.89	Usulan desain penetapan tahun 2024	62080
27	Kel. HPT-HP S. Mirih	51,225.48	Usulan desain penetapan tahun 2024	62081
28	KSA/KPA Nyaru Menteng	1,720.78	Usulan desain penetapan tahun 2024	62082
29	TWA Tangkiling	531.57	Usulan desain penetapan tahun 2024	62083
30	HPK S. Mentaya	140,454.97	Usulan desain penetapan tahun 2024	62084
31	Kawasan Konservasi Perairan Tanjung Puting	22,867.72	Usulan desain penetapan tahun 2024	62085

## A.2. IKK Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL

Kegiatan Inver PPTPKH telah dilaksanakan dengan pagu yang tersedia sebesar Rp. 33.741.187.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 33.741.090.912,- atau mencapai 100%.

Tabel 10. Hasil Inver PPTPKH Tahun 2024

REKAPITULASI REKOMENDASI POLA PENYELESAIAN PPTPKH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024								
KABUPATEN	KRITERIA PPTPKH	LUAS INDIKATIF (Ha)	LUAS PERMOHONAN (Ha)	LUAS YANG DIINVER (Ha)	POLA PENYELESAIAN (Ha)			
					PERUBAHAN BATAS	PERHUTANAN SOSIAL	TIDAK DIREKOMENDASI	TOTAL
BARITO TIMUR	LAHAN GARAPAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TAMBAK	3.826,89	3.679,06	2.705,27	649,44	1.493,42	562,42	2.705,27
	PERMUKIMAN DILUAR INDIKATIF	-		7,36	7,36	-	-	7,36
	PERMUKIMAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM	315,49		122,19	106,96	14,75	0,47	122,19
	<b>TOTAL</b>	<b>4.142,38</b>		<b>2.834,82</b>	<b>763,76</b>	<b>1.508,17</b>	<b>562,89</b>	<b>2.834,82</b>
PULANG PISAU	LAHAN GARAPAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TAMBAK	20.901,81	30.868,32	20.891,46	4.541,18	8.825,97	7.524,32	20.891,46
	PERMUKIMAN DILUAR INDIKATIF	-		339,19	334,22	0,20	4,77	339,19
	PERMUKIMAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM	696,83		696,82	280,55	185,77	230,50	696,82
	<b>TOTAL</b>	<b>21.598,64</b>		<b>21.927,47</b>	<b>5.155,94</b>	<b>9.011,94</b>	<b>7.759,59</b>	<b>21.927,47</b>
MURUNG RAYA	LAHAN GARAPAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TAMBAK	15.392,21	23.535,23	15.391,92	3.010,98	7.117,97	5.262,97	15.391,92
	PERMUKIMAN DILUAR INDIKATIF	-		706,64	578,32	2,75	125,57	706,64
	PERMUKIMAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM	1.104,18		1.101,63	420,37	385,59	295,67	1.101,63
	<b>TOTAL</b>	<b>16.496,39</b>		<b>17.200,19</b>	<b>4.009,67</b>	<b>7.506,31</b>	<b>5.684,21</b>	<b>17.200,19</b>
SUKAMARA	LAHAN GARAPAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TAMBAK	15.859,23	26.343,24	13.182,75	4.312,43	5.462,39	3.407,93	13.182,74
	PERMUKIMAN DILUAR INDIKATIF	-		122,44	106,59	-	15,85	122,44
	PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BESERTA FASILITAS SOSIAL *	10.114,84		3.286,74	1.525,23	997,09	764,42	3.286,74
	PERMUKIMAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM	594,35		473,99	380,69	60,46	32,84	473,99
	<b>TOTAL</b>	<b>26.568,42</b>		<b>17.065,92</b>	<b>6.324,94</b>	<b>6.519,94</b>	<b>4.221,04</b>	<b>17.065,92</b>
SERUYAN	LAHAN GARAPAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TAMBAK	68.656,89	95.235,73	55.627,94	10.417,29	25.569,67	19.640,99	55.627,94
	PERMUKIMAN DILUAR INDIKATIF	-		93,32	65,85	-	27,47	93,32
	PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BESERTA FASILITAS SOSIAL *	8.764,77		1.127,83	79,06	1.007,42	41,35	1.127,83
	PERMUKIMAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM	3.359,31		2.088,85	714,45	767,52	606,87	2.088,85
	<b>TOTAL</b>	<b>80.780,97</b>		<b>58.937,94</b>	<b>11.276,65</b>	<b>27.344,61</b>	<b>20.316,68</b>	<b>58.937,94</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>149.586,80</b>	<b>179.661,58</b>	<b>117.966,34</b>	<b>27.530,96</b>	<b>51.890,96</b>	<b>38.544,42</b>	<b>117.966,34</b>

Selain melaksanakan Inver PPTPKH diatas, BPKHTL XXI juga melaksanakan Inver PPTPKH khusus penyelesaian sawit rakyat di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas Inver seluas 1.293, 58 Ha dengan rekomendasi berupa perubahan batas seluas 688,08 Ha (151 bidang) dan pola perhutanan sosial atau program lainnya sesuai dengan peraturan perundangan seluas 605,50 Ha (123 bidang).



### A.3. IKK Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL

Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 1.817.480.000,- dengan realisasi Rp. 1.817.369.464,- atau mencapai 99,99%.

Tabel 11. Klaster Inventarisasi Hutan Nasional Tahun 2024

No.	Kabupaten	Klaster		Kawasan Hutan
		X	Y	
1	Seruyan	640000	9670000	HPK
2	Pulang Pisau	800000	9690000	HP
3	Barito Selatan	250000	9830000	HP
4	Kapuas	230000	9790000	HL
5	Kapuas	170000	9820000	HP
6	Palangka Raya	820000	9740000	TN
7	Kapuas	240000	9760000	KSA/KPA
8	Kotawaringin Timur	730000	9700000	HP
9	Kotawaringin Timur	740000	9760000	HP
10	Pulang Pisau	830000	9710000	TN
11	Kapuas	220000	9860000	HP
12	Katingan	710000	9860000	HP
13	Kotawaringin Timur	630000	9820000	HPT
14	Kotawaringin Timur	670000	9830000	HPT
15	Lamandau	560000	9820000	HPT
16	Kapuas	230000	9860000	HP
17	Katingan	690000	9900000	HPT
18	Katingan	670000	9900000	TN
19	Gunung Mas	750000	9910000	HPT
20	Katingan	730000	9920000	HPT
21	Gunung Mas	810000	9840000	HP
22	Barito Selatan	320000	9850000	HP
23	Gunung Mas	760000	9920000	HPT
24	Kapuas	220000	9900000	HP
25	Murung Raya	260000	9960000	HL
26	Murung Raya	200000	9940000	HP
27	Kotawaringin Timur	650000	9860000	HPT
28	Kotawaringin Timur	660000	9850000	HPT
29	Barito Utara	240000	9860000	HP
30	Kapuas	180000	9900000	HP

#### **A.4. IKK Data dan informasi penutupan lahan Nasional di wilayah kerja BPKHTL**

Kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang dalam rangka penutupan lahan tahun 2024 telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.94.920.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 94.620.000,- atau mencapai 99,68%. Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana tabel 12.

Tabel 12. Lokasi Ground Cek Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Tahun 2024

No	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Kota Palangka Raya	3 - 11 Oktober
2	Murung Raya	10 - 21 Oktober
3	Sukamara	10 - 21 Oktober
4	Pulang Pisau	17 - 28 Oktober

#### **A.5. IKK Hasil verifikasi PNBP dan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL**

Kegiatan verifikasi PNBP dan Evaluasi PPKH telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 2.859.826.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.859.762.698,- atau mencapai 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13. Daftar Wajib Bayar kegiatan verifikasi PNPB Tahun 2024 ( Lapangan )

No	LOKASI	Kabupaten	NO SK	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Maruwai Coal, PT	Murung Raya	SK.4183/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/4/2019	19-27 Februari 2024
2	Duta Nurcahya, PT	Barito Utara	11/1/IPPKH/PMDN/2015	19-27 Februari 2024
3	Kalimantan Prima Nusantara, PT	Kapuas	SK.1319/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/3/2018	19-27 Februari 2024
4	Victor Dua Tiga Mega, PT	Barito Utara	SK.281/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2022	5-13 Maret 2024
5	Batara Perkasa, PT	Barito Utara	SK.4804/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2023	20-28 Maret 2024
6	Telen Orbit Prima, PT	Kapuas	SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023	20-28 Maret 2024
7	Suprabari Mapanindo Mineral, PT	Barito Utara	SK.946/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2022	23 April-1 Mei 2024
8	Arsy Nusantara, PT	Barito Utara	SK.4082/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2022	23 April-1 Mei 2024
9	Surya Kalimantan Sejati, PT	Gunung Mas	SK.1092/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022	23 April-1 Mei 2024
10	Montalat Jaya Utama, PT	Barito Selatan	SK.431/Menhut-II/2013	14-22 Mei 2024
11	Rimau Energy Mining	Barito Timur	SK.5531/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2022	14-22 Mei 2024
12	Pada Idi, PT	Barito Utara	SK.428/MenLHK/Setjen/Pla.0/7/2019	4-12 Juni 2024
13	Marunda Grahamineral, PT	Murung Raya	SK.416/Menhut-II/2009	4-12 Juni 2024
14	Parenggean Makmur Sejahtera, PT	Kotawaringin Timur	SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2023	25 Juni-3 Juli 2024
15	Marunda Grahamineral, PT	Murung Raya	SK.4909/Menlhk-PKTL/Ren/OTL.0/7/2018	25 Juni-3 Juli 2024
16	Berkat Bumi Persada, PT	Barito Utara	SK.127/1/KLHK/2020	25 Juni-3 Juli 2024
17	Berkat Bumi Persada, PT	Barito Utara	SK.6660/MenLHK-PKTL/Ren/Pla.0/8/2019	10-18 Juli 2024
18	Pada Idi, PT	Barito Utara	SK.6482/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2022	10-18 Juli 2024
19	Semesta Alam Barito, PT	Murung Raya	SK.3403/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2016	4-12 September 2024
20	Adaro Indonesia, PT	Barito Timur dan Barito Selatan	SK.1043/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022	4-12 September 2024
21	Lautan Hutan Lestari, PT	Barito Utara	SK.7479/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2022	4-12 September 2024
22	Indo Muro Kencana, PT	Murung Raya	SK.540/Menhut-II/2012	18-26 September 2024
23	Graha Equity Investment, PT	Kapuas	SK.443/1/KLHK/2020	18-26 September 2024
24	Batubara Duaribu Abadi, PT	Baito Utara dan Barito Selatan	SK.681/Menhut-II/2009	18-26 September 2024
25	Batara Perkasa, PT	Barito Utara	SK.435/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2018	18-26 September 2024
26	Bara Prima Mandiri, PT	Barito Selatan	SK.556/Menhut-II/2009	16-24 Oktober 2024
27	Alam Bahtera Barito Raya	Barito Utara	SK.1166/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2022	16-24 Oktober 2024
28	Multi Tambangjaya Utama, PT	Barito Selatan, Barito Tmur dan Barito Utara	SK.819/Menhut-II/2013	31 Oktober-8 November 2024
29	Padang Anugerah, PT	Barito Utara	SK.290/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2021	31 Oktober-8 November 2024
30	Suprabari Mapanindo Mineral, PT	Barito Utara	SK.377/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2019	7-15 November 2024
31	Yastra Energy, PT	Barito Utara	SK.688/Menhut-II/2011	7-15 November 2024
32	Energitama Bumi Arum	Murung Raya	SK.1212/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2022	19-27 November 2024
33	Bara Utama Sejati, PT	Kapuas	PAK : SK.10158/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12	19-27 November 2024
34	Sumber Rejeki Ekonomi, PT	Barito Utara	402/MenLHK/Setjen/Pla.0/9/2018	2-10 Desember 2024
35	Borneo Prima, PT	Murung Raya	14/1/IPPKH/PMA/2018	2-10 Desember 2024
36	Nantoy Bara Lestari, PT	Barito Utara	SK.104/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2018	2-10 Desember 2024
37	Permata Indah Sinergi, PT	Barito Utara	SK.37/MENLHK/SETJEN/PLA./1/2023	2-10 Desember 2024

Tabel 14. Hasil kegiatan verifikasi PNPB Tahun 2024 ( Desk Analisis )

No	LOKASI	Kabupaten	NO SK	TANGGAL RAPAT
1	Cakrawala Bara Persada	Kapuas	SK.423/Menlhk/Setjen/Pla.0/9/2018	11-Nov
2	Griya Sumber Setya	Barito Selatan	SK.142/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019	11-Nov
3	Pesona Bara Cakrawala	Kapuas	SK.857/Menhut-II/2013	11-Nov
4	Lahei Jaya Mandiri	Barito Utara	SK.33/1/KLHK/2020	11-Nov
5	Huma Amaz Indonesia	Murung Raya	SK.309/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019	11-Nov

Tabel 15. Hasil kegiatan Evaluasi PPKH Tahun 2024 ( Lapangan )

No	LOKASI	Kabupaten	NO SK	Tanggal Pelaksanaan
1	Huma Betang Indah, PT	Barito Selatan	SK.584/Menhut-II/2011	2 Oktober - 11 Oktober
2	Palopo Indah Raya, PT	Barito Selatan	SK.102/Menhut-II/2014	2 Oktober - 11 Oktober
3	Batubara Kalimantan, PT	Barito Timur	SK.128/Menhut-II/2014	2 Oktober - 11 Oktober
4	Sarana Putra Perdana, PT	Barito Timur	SK.656/Menhut-II/2013	2 Oktober - 11 Oktober
5	Sembilan Tiga Perdana, PT	Kapuas	SK.34/1/KLHK/2020	2 Oktober - 11 Oktober
6	Berkat Bersaudara Nusantara, PT	Kapuas	SK.630/Menhut-II/2014	2 Oktober - 11 Oktober
7	Citra Mentaya Mandiri, PT	Kotawaringin Timur	22/1/IPPKH/PMDN/2017	2 Oktober - 11 Oktober
8	Duta Borneo Pratama, PT	Kotawaringin Timur	21/1/IPPKH/PMDN/2017	2 Oktober - 11 Oktober
9	Pemerintah Kabupaten Seruyan	Seruyan	SK.7241/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2022	17-22 Oktober
10	Satriati Jaya Sukses, PT	Barito Utara	SK.435/Menhut-II/2013	31 Oktober- 9 November
11	Harfa Taruna mandiri, PT	Barito Utara	SK.151/MENLHK/SETJEN/PLA.0//2/2022	31 Oktober- 9 November
12	Kuda Perdana Pertiwi, PT	Murung Raya	SK.308/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2021	31 Oktober- 9 November
13	Loa Haur, PT	Murung Raya	SK.501/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021	31 Oktober- 9 November
14	Padang Anugerah, PT	Barito Utara	SK.493/MenLHK/Setjen/Pla.0/12/2018	19-28 November
15	Hamparan Mulya	Barito Utara	SK.1108/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022	19-28 November
16	Mitra Barito, PT	Barito Utara	SK.945/menlhk/setjen/Pla.0/10/2019	19-28 November
17	Bunda Kandung, CV	Barito Utara	SK.502/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018	19-28 November
18	Kapuas Bara Utama, PT	Kapuas	18/1/IPPKH/PMDN/2015	19-28 November
19	Global Bara Mandiri, PT	Kapuas	SK.119/Menlhk/Setjen/Pla.0/2/2019	19-28 November
20	Kapuas Prima Coal, PT	Lamandau	SK.713/Menhut-II/2009	19-28 November
21	Kapuas Prima Coal, PT	Lamandau	47/1/IPPKH/PMDN/2018	19-28 November
22	Alam Sutera, PT	Gunung Mas	27/1/IPPKH/PMDN/2015	19-28 November
23	Dayak Membangun Pratama, PT	Gunung Mas	24/1/IPPKH/PMDN/2016	19-28 November
24	Kapuas Tunggal Persada, PT	Kapuas	SK.230/Menhut-II/2010	19-28 November
25	Agung Bara Prima, PT	Kapuas	97/1/IPPKH/PMDN/2017	19-28 November
26	Electra Global, PT	Barut dan barsel	SK.432/Menhut-II/2013	19-24 November
27	Sylva Sari, PT	Kotawaringin Timur	26/1/IPPKH/PMDN/2016	19-24 November
28	Bumi Karunia Pertiwi, PT	Barito Utara	SK.242/Menhut-II/2011	2-11 Desember
29	Trisula Kencana Sakti, PT	Barito Utara	SK.319/Menhut-II/2010	2-11 Desember
30	Bharinto Ekutama	Barito Utara	PAK: 2829/MENLHKL-PKTL/REN/PLA.0/5/2020	2-11 Desember
31	Tamtama Perkasa, PT	Barito Utara	SK.740/Menhut-II/2012	2-11 Desember
32	Asmin Koalindo Tuhup, PT	Murung Raya	SK.307/Menhut-II/2009	2-11 Desember
33	Asmin Koalindo Tuhup, PT	Murung Raya	SK.278/Menhut-II/2012	2-11 Desember
34	Asmin Bara Jaan, PT	Murung Raya	SK.35/Menhut-II/2011	2-11 Desember
35	Indo Muro Kencana, PT	Murung Raya	014/Kwl-6/IV/94	2-11 Desember
36	Trisula Kencana Sakti, PT	Barito Timur	SK.199/1/KLHK/2020	2-11 Desember
37	Padang Mulia	Barito Timur	SK.110/MENHUT-II/2012	2-11 Desember
38	Bimaruna Abadi, PT	Kotawaringin Barat	28/1/IPPKH/PMDN/2018	2-7 Desember
39	Kasongan Bumi Kencana	Katingan	SK.600/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018	2-7 Desember
40	Riyanta Jaya	Kapuas	SK.367/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019	2-7 Desember

Tabel 16. Hasil kegiatan Evaluasi PPKH Tahun 2024 ( Desk Analisis )

No	LOKASI	Kabupaten	NO SK	TANGGAL RAPAT
1	Medco Energi Bangkanai	Barito Utara	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2023	14 Oktober
2	Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.	Barito Utara	SK.507/Menhut-II/2012	14 Oktober
3	SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Ltd.	Barito Utara	SK.575/Menhut-II/2014	14 Oktober
4	Bara International, PT	Murung Raya	SK.371/Menhut-II/2010	28 Oktober
5	Citra Indah Matahari, PT	Palangka Raya	SK.621/Menhut-II/2012	28 Oktober
6	Koperasi Jembatan Dua Mandiri	Barito Timur	SK.697/Menhut-II/2011	28 Oktober
7	Tujuh Saudara, PT	Barito Timur	SK.163/Menhut-II/2014	28 Oktober
8	Mas Sari, PT	Kapuas	SK.70/1/KLHK/2020	29 Oktober
9	Sungai Batu Utama, PT	Kapuas	SK. 95/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2021	29 Oktober
10	Pemerintah Kabupaten Katingan	Katingan	SK. 149/MenLHK/Setjen/Pla.0/2/2019	29 Oktober
11	PLN (Persero), PT	Barut, Bartim	99/1/IPPKH/PMDN/2017	29 Oktober
12	Kara Elmas Madenleri, CV	Barito Utara	SK.489/MenLHK/Setjen/Pla.0/11/2018	13-Nov
13	Mustika Indah Abadi, PT	Barito Selatan	SK.40/1/KLHK/2020	13-Nov
14	Wahana Agung Sejahtera, PT	Barito Selatan	SK.136/Menhut-II/2012	13-Nov
15	Dahlia Biru, PT	Barito Selatan	30/1/IPPKH/PMDN/2015	13-Nov
16	Bumi Kencana Sentosa, PT	Kapuas	SK.198/Menhut-II/2012	13-Nov
17	Persada Kapuas Prima	Kapuas	PKTL/Ren/Pla.0/1/2022	14-Nov
18	Bangun Nusantara jaya Makmur	Barito Timur	PKTL/Ren/PLA.0?10/2020	14-Nov
19	Putra Asyano Mutiara Timur, PT	Barito Timur	SK.686/Menhut-II/2013	14-Nov
20	Farindo Bersaudara, PT	Lamandau	28/1/IPPKH/PMDN/2016	14-Nov

21	Sumber Kencana Bumi Kaya, PT	Kapuas	15/1/IPPKH/PMDN/2017	14-Nov
22	Batubara Duaribu Abadi	Barito Utara, Barito selatan	SK.557/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018	18-Nov
23	Borneo Prima Coal Indonesia	Barito Utara	SK.495/Menhut-II/2013	18-Nov
24	Indo Mineralita Prima	Seruyan	SK.510/menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018	18-Nov
25	Graha Surya Tambang	Seruyan	SK.585/Menhut-II/2014	18-Nov
26	Tri Oetama Persada	Kapuas	SK. 36/1/IPPKH/PMDN/2017	22-Nov
27	Tri Oetama Persada	Barito Selatan	PKTL/REN/PLA.0/8/2022	22-Nov
28	Pasir Bara Prima	Kapuas	SK.617/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018	22-Nov
29	Pelita Jaya Prima	Kapuas	PKTL/REN/PLA.0/4/2019	22-Nov
30	Palma Mandiri Lestari	Kapuas	SK.189/MRANHUT-II/2012	22-Nov
31	Permata Mulya Agung	Barito utara	SK.392/Menhut-II/2012	25-Nov
32	Utami Jaya Mulia	Barito Utara	21/1/IPPKH/PMDN/2015	25-Nov
33	Daya Bumindo Karunia	Murung Raya	SK.700/Menhut-II/2009	25-Nov
34	Pusaka Tanah Persada	Murung Raya	SK.378/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2022	25-Nov
35	Bumi Barito Mineral	Murung Raya	15/1/IPPKH/PMA/2015	25-Nov
36	Feron tambang kalimantan	Kotawaringin Timur	SK.635/Menhut-II/2012	29-Nov
37	CV Arjuna	Barito Utara	SK.143/1/KLHK/2020	29-Nov
38	Mirah Ganal energy	Barito Utara	SK.1203/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2023	29-Nov
39	Abadi jaya indah	Kapuas	SK.45/Menhut-II/2014	29-Nov

#### A.6. IKK Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL

Kegiatan layanan tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 282.656.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 282.631.508,- atau mencapai 99,99 %. Hasil pelaksanaan kegiatan berupa Rapat Koordinasi Tata Lingkungan serta kegiatan Verifikasi Jasa Lingkungan Tinggi sebagaimana tabel 17.

Tabel 17. Lokasi Verifikasi Jasa Lingkungan Tinggi Tahun 2024

REGU	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA	Penutupan lahan	KATEGORI	SUB KATEGORI
I	BARITO SELATAN	DUSUN SELATAN	TELANG ANDRAU	Hutan Rawa Sekunder	C	C (Kehati)
			PAMAIT	Hutan Rawa Sekunder	A	A
		KARAU KUALA	TAMPIJAK	Hutan Rawa Sekunder	A	A
			TALIO	Hutan Rawa Sekunder	A	A
2	KAPUAS	KAPUAS TENGAH	MARAPIT	Hutan Sekunder	A	A
			PUJON	Hutan Sekunder	A	A
			TAPEN	Hutan Sekunder	A	A
			HURUNG PUKUNG	Hutan Sekunder	A	A
3	KATINGAN	PETAK MALAI	NUSA KUTAU	Hutan Sekunder	A	B (Karbon & Kehati)
			TIMBANG JALA	Hutan Sekunder	A	A
		KATINGAN TENGAH	TUMBANG PARIYEI	Hutan Sekunder	A	A
			TUMBANG HANGEI	Hutan Sekunder	A	A

#### **A.7. IKK Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL**

Kegiatan layanan tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 581.252.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 581.246.542,- atau mencapai 100 %. Pelaksanaan kegiatan berupa mengikuti pelatihan dan diklat lingkungan serta kegiatan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas serta pemahaman kepada seluruh pegawai BPKHTL XXI yang berkaitan dengan Peran pentingnya Informasi Geospasial dalam Pembangunan Kewilayahan, yang akan disampaikan oleh Fakultas Geografi UGM, Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) melalui SIGAP KLHK untuk Mendukung Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan yang mengacu pada Permenlhk No. 24 Tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Dit. IPSDH, Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan yang terintegrasi pada AMDAL.Net, oleh Dit. PDLUK, serta Ground Cek untuk membandingkan Data IGT KLHK dengan Kondisi lapangan pada Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merapi.

#### **A.8. IKK Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya telah menyusun dokumen perencanaan kinerja. Pedoman teknis perencanaan kinerja mengacu pada pedoman teknis di tingkat Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri LHK, yaitu : Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri LHK Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja KLHK, Peraturan Menteri LHK Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KLHK, dan Keputusan Menteri LHK No. 975 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penilaian mandiri SAKIP BPKHTL XXI telah dilaksanakan melalui <https://esakip.menlhk.id/> dengan nilai pengajuan 89,80, selanjutnya Inspektorat selaku penjamin mutu telah melakukan penilaian dengan memberikan nilai 80,23 dengan kategori BB. Nilai 80,23 ini telah memenuhi target nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar 80.

### A.9. Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Pelaksanaan SPIP mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 353).

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya telah melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP pada <https://simawas.itjen.menlhk.go.id/spip-maturitas>, Inspektorat Jenderal KLHK telah melakukan review dan penjaminan kualitas dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 18. Hasil penilaian maturitas Tahun 2024

NO	PENILAIAN	PENILAIAN MANDIRI		PENJAMIN KUALITAS	
		NILAI	LEVEL	NILAI	LEVEL
1	NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	4.1605	4	3.7564	3
2	NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)	4.5625	5	3.7625	3
3	NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	4.7360	5	3.6880	3

Berdasarkan nilai diatas level maturitas SPIP BPKHTL XXI Palangka Raya pada level 3, hal ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dimana level maturitas minimal pada level 3.

### A. 10. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya

adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan agar mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pada saat ini laporan keuangan tingkat satuan kerja sedang disusun dan menunggu tahap rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon 1.


#### **A. 11. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja Kementerian/Lembaga, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan Kementerian/Lembaga.

Penilaian IKPA Tahun 2024 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu: Aspek **kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran**, yang terdiri dari 2 indikator yaitu Revisi DIPA, dan Deviasi Halaman III DIPA. Aspek **kualitas implementasi pelaksanaan anggaran**, yang terdiri dari 5 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek **kualitas hasil pelaksanaan anggaran**, dengan 1 indikator yaitu Capaian Output. Berdasarkan data OMSPAN per tanggal 14 Januari 2025 nilai IKPA tahun 2024 sebesar 91,84 termasuk kategori **Baik** yaitu dalam range nilai  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ .



Tabel 19. IKPA BPKHTL XXI Palangka Raya Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	043	029	145160	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA	Nilai	100.00	79.18	84.42	96.00	100.00	84.82	100.00	91.84	100%	0.00	91.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.88	16.88	9.60	10.00	8.48	25.00				
					Nilai Aspek	89.59		91.31				100.00				

### A3. Analisis pembahasan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2020-2024

Tabel 21. Realisasi Pencapaian Kegiatan 2024 dengan Renstra 2020-2024

No	Kegiatan	Target Renstra		Realisasi					Gap
		Vol	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	2	Layanan	-	-	-	1	1	0
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan	2	Layanan	-	-	-	1	1	0
3	Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	1	Dokumen	-	1	-	-	-	0
4	Ground Check Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang	16	Kabupaten	2	2	4	4	4	0
5	Enumerasi PSP/TSP	46	Klaster	4	6	-	1	30	- 5
6	Verifikasi Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	5	Laporan	1	1	1	1	1	0
7	Dokumen Hasil Inver dan BATB Obyek TORA	1	Provinsi	1	1	1	1	1	0
8	Tata Batas Kawasan Hutan Reguler	13.458	Km	2.010,41	4.999,83	2.010,55	4.713,34	-	+ 276,13

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa realisasi capaian output berdasarkan target Renstra BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya telah berjalan sesuai dengan rencana. Target kegiatan tata batas Kawasan hutan reguler telah diselesaikan 100% pada tahun 2023, penyelesaian Inver PPTPKH telah selesai untuk seluruh 14 kabupaten/kota pada tahun 2024, namun terdapat kegiatan yang masih menyisakan target pada masa akhir Renstra 2020-2024 yaitu kegiatan inventarisasi hutan nasional (Enumerasi PSP/TSP) sebanyak 5 Klaster.

### A4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar – Nasional

Capaian kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya tahun 2024 mencapai angka 99,99 % dimana angka ini lebih tinggi dari rata-rata capaian kinerja BPKHTL yaitu 99,80 %. Data ini menunjukkan bahwa kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya telah mendorong dan mendukung penuh atas capaian kinerja Direktorat Jenderal PKTL serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### **A5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Peningkatan kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya tahun 2024 ini ditentukan banyak faktor. Keberhasilan peningkatan ini salah satunya ditentukan dengan adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Seluruh Pegawai untuk menyelesaikan dan meningkatkan kinerja secara Bersama-sama. Langkah-langkah pendukung dilakukan dengan memanfaatkan bantuan tenaga teknis (BKO) dari BPKHTL lain, UPT KLHK, maupun dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, bantuan tenaga ini menjadi amunisi tambahan untuk penyelesaian target kegiatan tahun 2024. Selanjutnya meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikuti diklat maupun pelatihan secara rutin. Memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, LSM, serta masyarakat desa sekitar Kawasan hutan. BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya juga selalu berupaya untuk menambah dan memperbaiki sarana prasarana kerja antara lain : GNSS Geodetik, Laptop, alat ukur IHN, maupun perlengkapan teknis penunjang lainnya.

#### **A6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana pengeluaran dan penerimaan yang disusun oleh Pemerintah dalam skala nasional. Sebagai alat pengaturan keuangan negara yang meliputi pendapatan dan belanja, APBN harus dikelola dengan baik agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini karena APBN memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kestabilan keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi pengelolaan APBN berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBN adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBN di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBN. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan APBN juga dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengumpulan dan pengolahan data, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia.

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya telah menerapkan pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian target kegiatan tahun 2024. Pada kegiatan verifikasi pembayaran PNPB telah dilaksanakan verifikasi secara desk analisis dengan memanfaatkan penafsiran citra satelit resolusi tinggi maupun sangat tinggi. Hal ini berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran dikarenakan tim verifikasi tidak harus selalu turun ke lapangan yang membutuhkan penyediaan anggaran yang tidak sedikit. Verifikasi desk analisis ini tidak mengurangi kualitas hasil verifikasi, untuk wajib bayar yang dilakukan verifikasi desk analisis telah dicermati terkait dengan kondisi bukaan lahan melalui citra satelit. Pada tahun 2024 terdapat target verifikasi PNPB sejumlah 42 wajib bayar, dari total target dimaksud ada 5 wajib bayar yang dilakukan verifikasi secara desk analisis sebagai berikut :

No	LOKASI	Kabupaten	NO SK	TANGGAL RAPAT
1	Cakrawala Bara Persada	Kapuas	SK.423/Menlhk/Setjen/Pla.0/9/2018	11-Nov
2	Griya Sumber Setya	Barito Selatan	SK.142/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019	11-Nov
3	Pesona Bara Cakrawala	Kapuas	SK.857/Menhut-II/2013	11-Nov
4	Lahei Jaya Mandiri	Barito Utara	SK.33/1/KLHK/2020	11-Nov
5	Huma Amaz Indonesia	Murung Raya	SK.309/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019	11-Nov

Pada kegiatan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH) terdapat target evaluasi sejumlah 79 unit usaha, dari total target dimaksud terdapat 39 unit usaha yang telah dilakukan evaluasi secara desk analisis dengan data sebagai berikut :

No	LOKASI	Kabupaten	NO SK	TANGGAL RAPAT
1	Medco Energi Bangkanai	Barito Utara	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2023	14 Oktober
2	Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.	Barito Utara	SK.507/Menhut-II/2012	14 Oktober
3	SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Ltd.	Barito Utara	SK.575/Menhut-II/2014	14 Oktober
4	Bara International, PT	Murung Raya	SK.371/Menhut-II/2010	28 Oktober
5	Citra Indah Matahari, PT	Palangka Raya	SK.621/Menhut-II/2012	28 Oktober
6	Koperasi Jembatan Dua Mandiri	Barto Timur	SK.697/Menhut-II/2011	28 Oktober
7	Tujuh Saudara, PT	Barito Timur	SK.163/Menhut-II/2014	28 Oktober
8	Mas Sari, PT	Kapuas	SK.70/1/KLHK/2020	29 Oktober
9	Sungai Batu Utama, PT	Kapuas	SK. 95/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2021	29 Oktober
10	Pemerintah Kabupaten Katingan	Katingan	SK. 149/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019	29 Oktober
11	PLN (Persero), PT	Barut, Bartim	99/1/IPPKH/PMDN/2017	29 Oktober
12	Kara Emas Madenleri, CV	Barito Utara	SK.489/MenLHK/Setjen/Pla.0/11/2018	13-Nov
13	Mustika Indah Abadi, PT	Barito Selatan	SK.40/1/KLHK/2020	13-Nov
14	Wahana Agung Sejahtera, PT	Barito Selatan	SK.136/Menhut-II/2012	13-Nov
15	Dahlia Biru, PT	Barito Selatan	30/1/IPPKH/PMDN/2015	13-Nov
16	Bumi Kencana Sentosa, PT	Kapuas	SK.198/Menhut-II/2012	13-Nov
17	Persada Kapuas Prima	Kapuas	PKTL/Ren/Pla.0/1/2022	14-Nov
18	Bangun Nusantara jaya Makmur	Barito Timur	PKTL/Ren/Pla.0/10/2020	14-Nov
19	Putra Asyano Mutiara Timur, PT	Barito Timur	SK.686/Menhut-II/2013	14-Nov
20	Farindo Bersaudara, PT	Lamandau	28/1/IPPKH/PMDN/2016	14-Nov
21	Sumber Kencana Bumi Kaya, PT	Kapuas	15/1/IPPKH/PMDN/2017	14-Nov
22	Batubara Duaribu Abadi	Barito Utara, Barito selatan	SK.557/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018	18-Nov
23	Borneo Prima Coal Indonesia	Barito Utara	SK.495/Menhut-II/2013	18-Nov
24	Indo Mineralita Prima	Seruyan	SK.510/menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018	18-Nov
25	Graha Surya Tambang	Seruyan	SK.585/Menhut-II/2014	18-Nov
26	Tri Oetama Persada	Kapuas	SK. 36/1/IPPKH/PMDN/2017	22-Nov
27	Tri Oetama Persada	Barito Selatan	PKTL/REN/PLA.0/8/2022	22-Nov
28	Pasir Bara Prima	Kapuas	SK.617/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018	22-Nov
29	Pelita Jaya Prima	Kapuas	PKTL/REN/PLA.0/4/2019	22-Nov
30	Palma Mandiri Lestari	Kapuas	SK.189/MRANHUT-II/2012	22-Nov
31	Permata Mulya Agung	Barito utara	SK.392/Menhut-II/2012	25-Nov
32	Utami Jaya Mulia	Barito Utara	21/1/IPPKH/PMDN/2015	25-Nov
33	Daya Bumindo Karunia	Murung Raya	SK.700/Menhut-II/2009	25-Nov
34	Pusaka Tanah Persada	Murung Raya	SK.378/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2022	25-Nov
35	Bumi Barito Mineral	Murung Raya	15/1/IPPKH/PMA/2015	25-Nov
36	Feron tambang kalimantan	Kotawaringin Timur	SK.635/Menhut-II/2012	29-Nov
37	CV Arjuna	Barito Utara	SK.143/1/KLHK/2020	29-Nov
38	Mirah Ganal energy	Barito Utara	SK.1203/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2023	29-Nov
39	Abadi jaya indah	Kapuas	SK.45/Menhut-II/2014	29-Nov

Pada kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) juga telah dilakukan efisiensi penggunaan anggaran. Pemaanfaatkan penafsiran citra satelit resolusi tinggi maupun sangat tinggi telah dilakukan untuk mencermati peta indikatif PPTPKH yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6132 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan

(PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III.

Berdasarkan peta indikatif dimaksud terdapat luas peta indikatif di target 5 kabupaten ( Murung Raya, Barito Timur, Pulang Pisau, Seruyan, dan Sukamara) seluas 149.586,80 Ha denga luas permohonan yang diajukan pemerintah kabupaten total seluas 179.661,58 Ha. Berdasarkan analisis dan telaah secara desk analisis menggunakan penafsiran citra satelit resolusi tinggi maupun sangat tinggi terdapat areal pada peta indikatif dan areal permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagai obyek inver PPTPKH. Berdasarkan data analisis tersebut maka luas areal yang dilakukan inver PPTPKH seluas 117.966, 34 Ha dengan menurunkan tim verifikasi lapangan. Berdasarkan data diatas terdapat efisiensi penggunaan anggaran pada luasan peta indikatif seluas 31.620,46 Ha tanpa mengurangi kualitas dan target kegiatan sebagaimana data berikut:

KABUPATEN	KRITERIA PPTPKH	LUAS INDIKATIF (Ha)	LUAS PERMOHONAN (Ha)	LUAS YANG DIINVER (Ha)
BARITO TIMUR	LAHAN GARAPAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TAMBAK	3.826,89	3.679,06	2.705,27
	PERMUKIMAN DILUAR INDIKATIF	-		7,36
	PERMUKIMAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM	315,49		122,19
	<b>TOTAL</b>	<b>4.142,38</b>	<b>3.679,06</b>	<b>2.834,82</b>
PULANG PISAU	LAHAN GARAPAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TAMBAK	20.901,81	30.868,32	20.891,46
	PERMUKIMAN DILUAR INDIKATIF	-		339,19
	PERMUKIMAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM	696,83		696,82
	<b>TOTAL</b>	<b>21.598,64</b>	<b>30.868,32</b>	<b>21.927,47</b>
MURUNG RAYA	LAHAN GARAPAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TAMBAK	15.392,21	23.535,23	15.391,92
	PERMUKIMAN DILUAR INDIKATIF	-		706,64
	PERMUKIMAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM	1.104,18		1.101,63
	<b>TOTAL</b>	<b>16.496,39</b>	<b>23.535,23</b>	<b>17.200,19</b>
SUKAMARA	LAHAN GARAPAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TAMBAK	15.859,23	26.343,24	13.182,75
	PERMUKIMAN DILUAR INDIKATIF	-		122,44
	PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BESERTA FASILITAS SOSIAL *	10.114,84		3.286,74
	PERMUKIMAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM	594,35		473,99
	<b>TOTAL</b>	<b>26.568,42</b>	<b>26.343,24</b>	<b>17.065,92</b>
SERUYAN	LAHAN GARAPAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN TAMBAK	68.656,89	95.235,73	55.627,94
	PERMUKIMAN DILUAR INDIKATIF	-		93,32
	PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BESERTA FASILITAS SOSIAL *	8.764,77		1.127,83
	PERMUKIMAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM	3.359,31		2.088,85
	<b>TOTAL</b>	<b>80.780,97</b>	<b>95.235,73</b>	<b>58.937,94</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>149.586,80</b>	<b>179.661,58</b>	<b>117.966,34</b>

## A7. Penyajian informasi keuangan setiap sasaran kinerja tahun 2024

Tabel 22. Realisasi Kegiatan dan Serapan Keuangan Tahun 2024

PPK/Kegiatan	Rencana Kegiatan		Realisasi Kegiatan			Output	%
	Pagu	Output	Keu	%	Sisa Anggaran		
<b>PPK TU</b>							
- Layanan Perkantoran	6,878,558,000	1 Layanan	6,876,582,526	99.97	1,975,474	1 Layanan	100.00
- Layanan Umum	700,000,000	1 Layanan	699,906,999	99.99	93,001	1 Layanan	100.00
- Layanan Saran dan Prasarana Internal (Belanja Modal)	832,400,000	39 Unit	832,400,000	100.00	-	39 Unit	100.00
<b>Total PPK TU</b>	<b>8,410,958,000</b>		<b>8,408,889,525</b>	<b>99.98</b>	<b>2,068,475</b>		
<b>PPK PPKH</b>							
- Inventarisasi, Verifikasi, dan BATB Obyek TORA	33,741,187,000	1 Rekomendasi Kebijakan ( 5 Kabupaten)	33,741,090,912	100.00	96,088	1 Rekomendasi	100.00
- Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	134,657,000	1 Rekomendasi Kebijakan	134,628,085	99.98	28,915	1 Rekomendasi	100.00
<b>Total PPK PPKH</b>	<b>33,875,844,000</b>		<b>33,875,718,997</b>	<b>100.00</b>	<b>125,003</b>		
<b>PPK ISDHL</b>							
- Layanan Tata Lingkungan PDLKWS	282,656,000	1 Layanan	282,631,508	99.99	24,492	1 Layanan	100.00
- Layanan Tata Lingkungan PDLUK	581,252,000	1 Layanan	581,246,542	100.00	5,458	1 Layanan	100.00
- Enumerasi	1,817,480,000	30 Klaster	1,817,369,464	99.99	110,536	30 Klaster	100.00
- Penafsiran Citra Satelit	94,920,000	1 Layanan	94,620,000	99.68	300,000	1 Layanan	100.00
- Verifikasi PNPB	2,859,826,000	121 Badan Usaha	2,859,762,698	100.00	63,302	121 Badan Usaha	100.00
<b>Total PPK ISDHL</b>	<b>5,636,134,000</b>		<b>5,635,630,212</b>	<b>99.99</b>	<b>503,788</b>		
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>47,922,936,000</b>		<b>47,920,238,734</b>	<b>99.99</b>	<b>2,697,266</b>		

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran terbesar pada kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, mencapai angka Rp. 33.875.844.000,- atau 70,6 % dari total anggaran. Alokasi anggaran terbesar ke 2 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL sebesar Rp. 8.410.958.000,- atau 17,5 %, diikuti dengan kegiatan Verifikasi PNPB dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan, Inventarisasi Hutan Nasional, dan kegiatan tata lingkungan.

## A8. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau- Pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Alokasi anggaran untuk inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) mendapatkan aloksi terbesar sejumlah Rp. 33.741.187.000,-, kegiatan ini merupakan amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Keberhasilan penyelesaian kegiatan ini menjadi penyumbang terbesar terhadap keberhasilan capaian kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya, faktor pendukung keberhasilan antara lain ditentukan dengan

berhasilnya koordinasi dan kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan tim Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.266/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2022 tanggal 30 Maret 2022 Tentang Tim Inventarisasi Dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Di Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **A9. Menguraikan outcome atau dampak penting atas capaian kinerja setiap sasaran**

Setiap kegiatan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya memberikan outcome atau dampak terhadap pembangunan nasional. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) selain sebagai upaya memberikan kejelasan status hukum serta memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan, hasil kegiatan ini berupa rekomendasi Tim Inver PPTPKH Provinsi Kalimantan Tengah untuk penyelesaian permasalahan penguasaan tanah. Rekomendasi Tim Inver PPTPKH Tahun 2024 berupa Perubahan Batas Kawasan Hutan seluas 27.530,96 Ha, dan Perhutanan Sosial seluas 51.890,97 Ha, secara rinci rekomendasi per kabupaten sebagai berikut :

Tabel 23. Rekomendasi Tim Inver PPTPKH Tahun 2024

No.	Kabupaten	Luas Inver ( Ha)	Rekomendasi		
			PB ( Ha)	PS (Ha)	Tidak Rekom ( Ha)
1	Barito Timur	2.834,82	763,76	1.508,17	562,89
2	Pulang Pisau	21.927,47	5.155,94	9.011,94	7.759,59
3	Murung Raya	17.200,19	4.009,67	7.506,31	5.684,21
4	Sukamara	17.065,92	6.324,94	6.519,94	4.221,04
5	Seruyan	58.937,94	11.276,65	27.344,61	20.316,68
		<b>117.966,34</b>	<b>27.530,96</b>	<b>51.890,97</b>	<b>38.544,41</b>

Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan akan memberikan data dan informasi Sumberdaya Hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Data hasil kegiatan berupa tersajinya potensi hutan pada 30 klaster yang tersebar pada tipe hutan maupun lokasi kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, serta data terkini terkait dengan penutupan



lahan di tingkat provinsi. Tersedianya data dimaksud akan berdampak pada kualitas dan validnya data yang dipergunakan dalam dokumen perencanaan kehutanan.

Kegiatan verifikasi pembayaran PNBPN menghasilkan data ketaatan dan ketepatan pembayaran PNBPN. Terdapat data 42 wajib bayar yang telah dilakukan verifikasi pembayaran PNBPN, hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan maupun untuk mencegah adanya kekurangan pembayaran PNBPN oleh wajib bayar. Sedangkan kegiatan evaluasi persetujuan penggunaan akan berdampak pada kepatuhan unit usaha untuk memenuhi kewajiban yang tertuang sesuai dengan SK PPKH, pada tahun 2024 ini telah dilaksanakan evaluasi PPKH sebanyak 79 unit usaha.

Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan menghasilkan tersedianya data dan informasi terkait tata lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) adalah sebagai berikut, Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dalam perannya mendukung pembangunan nasional sehingga dapat meminimalisasi penurunan produktivitas lingkungan yang dapat menyebabkan beban sosial.

Kegiatan verifikasi Jasa lingkungan hidup tinggi merupakan penentu utama dalam membentuk informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) yang mana menjadi indikator kunci dan berfungsi sebagai rambu-rambu (*early warning system*) dalam pemanfaatan SDA. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor telah menyusun Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait Air, Karbon, dan Keanekaragaman Hayati dalam skala 1:250.000 dalam optimalisasi pemanfaatannya pada proses perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah. Peta Indikatif Jasa lingkungan hidup tinggi terkait Air, Karbon, Keanekaragaman tersebut perlu dikonfirmasi validitas dan akurasinya di lapangan yang dilakukan oleh BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya.

Sedangkan data terkait dokumen lingkungan yaitu memberikan gambaran yang jelas atas manfaat, risiko dan sasaran usaha/kegiatan/proyek yang dikelola serta memberikan gambaran yang jelas atas kondisi lingkungan hidup setempat baik biogeofisik, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar lokasi usaha/kegiatan/proyek yang dikelola. Dokumen lingkungan memiliki fungsi sebagai pemberi masukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dan pengelola kegiatan, pemberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan, serta pemberi informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL antara lain berupa pembayaran gaji tunjangan, belanja modal, serta reformasi birokrasi. Dampak dari aktifitas ini adalah bergulirnya roda perekonomian melalui belanja-belanja rutin serta adanya perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang telah dijalankan.

#### **A10.Menyajikan upaya perbaikan ke depan**

Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya cukup banyak. Terkait dengan sumberdaya manusia (SDM), BPKHTL XXI telah menyusun analisis beban kerja (ABK) sebagai dasar untuk pemenuhan personil baik dari sisi jumlah, maupun peningkatan status kepegawaianya. Pada tahun 2024 ada peningkatan status bagi 11 pegawai PPNP menjadi ASN dengan status P3K. Selanjutnya pada tahun ini juga telah dilakukan ujian penerimaan P3K yang berasal dari tenaga PPNPN sebanyak 6 pegawai pada tahap I dan 4 pegawai pada tahap II. Pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pada diklat, kursus maupun bimbingan teknis.

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya juga melakukan inovasi maupun mengimplementasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menunjang kinerja serta pelayanan, SPBE yang telah dilakukan antara lain Penerapan SRIKANDI, SIMOLEK+, SIDADU serta penggunaan aplikasi di bidang kepegawaian maupun keuangan.

Pada Tahun 2024 BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya juga telah menjalankan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2018, hal ini juga memperkuat untuk pencapaian target sasaran kinerja tahun 2024.

#### **A11.Dukungan Terhadap Prioritas Nasional**

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kegiatan yang dilaksanakan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya secara nyata telah mendukung kegiatan Prioritas Nasional (PN). Kegiatan utama yaitu Inver PPTPKH, dan Verifikasi Pembayaran PNBK, serta Evaluasi PPKH memberikan kontribusi pada Kegiatan Prioritas Nasional **(PN 1) yaitu : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.**

## B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya melalui kegiatan DIPA Tahun 2024 dialokasikan anggaran efektif sebesar sebesar **Rp. 47.922.936.000,-** ( *Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Hasil capaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp. 47.920.238.734,-** ( *Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) atau mencapai angka 99,99%. dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

PPK/Kegiatan	Rencana Kegiatan		Realisasi Kegiatan			Output	%
	Pagu	Output	Keu	%	Sisa Anggaran		
<b>PPK TU</b>							
- Layanan Perkantoran	6,878,558,000	1 Layanan	6,876,582,526	99.97	1,975,474	1 Layanan	100.00
- Layanan Umum	700,000,000	1 Layanan	699,906,999	99.99	93,001	1 Layanan	100.00
- Layanan Saran dan Prasarana Internal (Belanja Modal)	832,400,000	39 Unit	832,400,000	100.00	-	39 Unit	100.00
<b>Total PPK TU</b>	<b>8,410,958,000</b>		<b>8,408,889,525</b>	<b>99.98</b>	<b>2,068,475</b>		
<b>PPK PPKH</b>							
- Inventarisasi, Verifikasi, dan BATB Obyek TORA	33,741,187,000	1 Rekomendasi Kebijakan ( 5 Kabupaten)	33,741,090,912	100.00	96,088	1 Rekomendasi	100.00
- Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	134,657,000	1 Rekomendasi Kebijakan	134,628,085	99.98	28,915	1 Rekomendasi	100.00
<b>Total PPK PPKH</b>	<b>33,875,844,000</b>		<b>33,875,718,997</b>	<b>100.00</b>	<b>125,003</b>		
<b>PPK ISDHL</b>							
- Layanan Tata Lingkungan PDLKWS	282,656,000	1 Layanan	282,631,508	99.99	24,492	1 Layanan	100.00
- Layanan Tata Lingkungan PDLUK	581,252,000	1 Layanan	581,246,542	100.00	5,458	1 Layanan	100.00
- Enumerasi	1,817,480,000	30 Klaster	1,817,369,464	99.99	110,536	30 Klaster	100.00
- Penafsiran Citra Satelit	94,920,000	1 Layanan	94,620,000	99.68	300,000	1 Layanan	100.00
- Verifikasi PNPB	2,859,826,000	121 Badan Usaha	2,859,762,698	100.00	63,302	121 Badan Usaha	
<b>Total PPK ISDHL</b>	<b>5,636,134,000</b>		<b>5,635,630,212</b>	<b>99.99</b>	<b>503,788</b>		
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>47,922,936,000</b>		<b>47,920,238,734</b>	<b>99.99</b>	<b>2,697,266</b>		

### C. Penghargaan Atas Prestasi Kinerja

Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, mulai dari SDM hingga sarana dan prasarana kami selalu berupaya untuk menjadi semakin lebih baik, kepada seluruh pegawai yang telah membantu dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan tahun 2024 kami sangat mengapresiasi atas kinerja dan prestasi yang sudah menunjukkan kinerja positif selama tahun 2024.

Penghargaan yang diterima BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya adalah Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Tahun 2024 dalam Kategori Unit Kerja Yang Berkesinambungan Membangun Zona Integritas. Penghargaan ini diberikan dari Menteri Kehutanan pada Tanggal 28 November 2024.



#### IV. PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya yang berpedoman pada Rencana Kerja dan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pagu anggaran efektif yang tersedia sebesar **Rp. 47.922.936.000,-** ( *Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), dengan realiasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 47.920.238.734,-** ( *Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) atau mencapai angka 99,99 % dengan realisasi output 100 %;
- 2) Kualitas pelaksanaan anggaran berupa Nilai IKPA tahun 2024 sebesar 91,84 termasuk kategori **Baik** yaitu dalam range nilai  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ ;
- 3) BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Tahun 2024 dalam Kategori Unit Kerja Yang Berkesinambungan Membangun Zona Integritas dari Menteri Kehutanan pada Tanggal 28 November 2024.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 1 Tahun 2024;
  - b. Bahwa terdapat pemutakhiran target dan lokus penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6132 Tahun 2024 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Dan Realisasi PPTKH dan TORA Revisi III;
  - c. Bahwa terdapat perubahan alokasi anggaran yang disebabkan adanya pergeseran atau revisi anggaran berupa penyesuaian target dan anggaran untuk pelaksanaan PPTKH dan Sumber TORA sebagaimana huruf b di atas, penambahan belanja anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penambahan anggaran belanja pegawai operasional serta optimalisasi penggunaan anggaran di satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

3. Peraturan ...



3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756)
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 724);
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KLHK;
6. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.36/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2023 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2024 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN) DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.

**KESATU :** Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan) sebagaimana dimaksud merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 sampai hasil revisi anggaran terakhir, serta menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2024.

**KETIGA :** Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar ditindaklanjuti dengan Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perubahan) secara berjenjang serta Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebagaimana lampiran II dan III.

KEEMPAT ...



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

HERBAN HERYANDANA  
NIP. 19730523 199803 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Program, Evaluasi,  
Hukum dan Kerjasama Teknik,



ALI MA'MUR  
NIP. 19750519 200003 1 002



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P.  
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangkaraya

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19730523 199803 1 002

Pihak Pertama,

Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P.  
NIP. 19800125 200501 1 008

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

SATUAN KERJA : 145160. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
				SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1	1	Layanan
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1	1	Layanan
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	30	30	Layanan
			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
3.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	31	121	Unit
3.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	1	1	Layanan
		Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Provinsi
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80	80	Poin
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen
		Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	98,29	82,5	Poin



KRO	Rincian Output (RO)	Target RO			Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5436. Pencegahan Dampak Lingkungan						
5436.QAH Pelayanan publik lainnya	002. Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan	400.000.000	354.503.000
	003. Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan	700.000.000	621.497.000
5433. Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan						
5433.PBV Kebijakan Bidang Kehutanan	001. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	43.796.970.000	33.741.187.000
	002. Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	150.000.000	134.657.000
5434. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan						
5434.BMA Data dan Informasi Publik	002. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	30	30	Layanan	1.817.480.000	1.817.480.000
	003. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan	94.920.000	94.920.000
6744 Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan						
6744.BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	6744.BAC.001 Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	31	121	Badan Usaha	1.155.000.000	3.147.734.000

KRO	Rincian Output (RO)	Target RO			Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
5432.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	1	1	Layanan	700.000.000	700.000.000
	994. Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	6.167.583.000	6.878.558.000
5432.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951. Layanan Sarana Internal	39	39	Unit	832.400.000	832.400.000
	971. Layanan Prasarana Internal	-	-	Unit	-	-
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>55.814.353.000</b>	<b>48.322.936.000</b>
TOTAL BLOKIR					1.100.000.000	400.000.000

Jakarta, Desember 2024

Direktur Jenderal Planologi  
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19730523 199803 1 002

Kepala BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya,

Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P.  
NIP. 19800125 200501 1 008



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	043	029	145160	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA	Nilai	100.00	79.18	84.42	96.00	100.00	84.82	100.00	91.84	100%	0.00	91.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.88	16.88	9.60	10.00	8.48	25.00				
					Nilai Aspek	89.59		91.31				100.00				

# LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2024

Kementerian : 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : 06 DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Satuan Kerja : 145160 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>47,922,936,000</b>	<b>0</b>	<b>43,495,772,230</b>	<b>4,424,466,504</b>	<b>47,920,238,734</b>	<b>99.99 %</b>	<b>2,697,266</b>
FD Program Kualitas Lingkungan Hidup	863,908,000	0	393,392,736	470,485,314	863,878,050	100.00	29,950
FD.5436 Pencegahan Dampak Lingkungan	863,908,000	0	393,392,736	470,485,314	863,878,050	100.00	29,950
<b>QAH Pelayanan Publik Lainnya</b>	<b>863,908,000</b>	<b>0</b>	<b>393,392,736</b>	<b>470,485,314</b>	<b>863,878,050</b>	<b>100.00</b>	<b>29,950</b>
<b>QAH.002 Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL</b>	<b>282,656,000</b>	<b>0</b>	<b>159,391,508</b>	<b>123,240,000</b>	<b>282,631,508</b>	<b>99.99 %</b>	<b>24,492</b>
<b>051 Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</b>	<b>282,656,000</b>	<b>0</b>	<b>159,391,508</b>	<b>123,240,000</b>	<b>282,631,508</b>	<b>99.99 %</b>	<b>24,492</b>
051.OA Pengumpulan data dalam rangka kegiatan verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi di wilayah kerja BPKHTL	139,505,000	0	129,864,988	9,622,000	139,486,988	99.99 %	18,012
051.OB Pelaksanaa FGD Terkait Pendayagunaan Data dan Informasi dan Workshop Forum Bimbingan	143,151,000	0	29,526,520	113,618,000	143,144,520	100.00	6,480
<b>QAH.003 Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL</b>	<b>581,252,000</b>	<b>0</b>	<b>234,001,228</b>	<b>347,245,314</b>	<b>581,246,542</b>	<b>100.00</b>	<b>5,458</b>
<b>051 Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan</b>	<b>581,252,000</b>	<b>0</b>	<b>234,001,228</b>	<b>347,245,314</b>	<b>581,246,542</b>	<b>100.00</b>	<b>5,458</b>
051.OA Fasilitas Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	581,252,000	0	234,001,228	347,245,314	581,246,542	100.00	5,458
FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	38,648,070,000	0	35,598,721,435	3,048,749,724	38,647,471,159	100.00	598,841
FF.5433 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	33,875,844,000	0	32,018,577,397	1,857,141,600	33,875,718,997	100.00	125,003
<b>PBV Kebijakan Bidang Kehutanan</b>	<b>33,875,844,000</b>	<b>0</b>	<b>32,018,577,397</b>	<b>1,857,141,600</b>	<b>33,875,718,997</b>	<b>100.00</b>	<b>125,003</b>
<b>PBV.001 Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan</b>	<b>33,741,187,000</b>	<b>0</b>	<b>31,890,956,312</b>	<b>1,850,134,600</b>	<b>33,741,090,912</b>	<b>100.00</b>	<b>96,088</b>
<b>051 Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan</b>	<b>33,741,187,000</b>	<b>0</b>	<b>31,890,956,312</b>	<b>1,850,134,600</b>	<b>33,741,090,912</b>	<b>100.00</b>	<b>96,088</b>
051.OA Sosialisasi dan Pendataan Awal	723,253,000	0	723,159,097	33,100	723,192,197	99.99 %	60,803
051.OB Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan di Kab. Barito Timur (2.832 Ha)	875,613,000	0	875,610,000	0	875,610,000	100.00	3,000
051.OC Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan di Kab. Murung Raya (16.594 Ha)	4,615,572,000	0	4,615,554,700	0	4,615,554,700	100.00	17,300
051.OD Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan di Kab. Pulang Pisau (21.894 Ha)	5,658,288,000	0	5,658,286,364	0	5,658,286,364	100.00	1,636
051.OE Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan di Kab. Seruyan (61.787 Ha)	15,540,386,000	0	15,378,748,219	161,636,200	15,540,384,419	100.00	1,581
051.OF Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan di Kab. Sukamara (17.594 Ha)	3,778,846,000	0	3,629,242,300	149,603,700	3,778,846,000	100.00	0
051.OG Pelaksanaan Inventarisasi, Verifikasi Lapangan dan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA di Kab.	622,164,000	0	622,025,500	137,500	622,163,000	100.00	1,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



# LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2024

Kementerian : 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : 06 DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Satuan Kerja : 145160 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

Hal 2 dari 4

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0G	Kotawaringin Timur	622,164,000	0			622,163,000	100.00	1,000
051.0H	Pembahasan	1,210,354,000	0	239,670,000	970,683,100	1,210,353,100	100.00	900
051.0I	IKN dan Penyerahan SK TORA	148,670,000	0	148,660,132	0	148,660,132	99.99 %	9,868
051.0J	Belanja Modal	444,840,000	0	0	444,840,000	444,840,000	100.00	0
051.0K	Konsultasi dan Koordinasi	123,201,000	0	0	123,201,000	123,201,000	100.00	0
PBV.002	Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	134,657,000	0	127,621,085	7,007,000	134,628,085	99.98 %	28,915
051	Penataan batas kawasan hutan (reguler)	134,657,000	0	127,621,085	7,007,000	134,628,085	99.98 %	28,915
051.0A	Penyelesaian Penetapan KH di Tingkat Tapak	134,657,000	0	127,621,085	7,007,000	134,628,085	99.98 %	28,915
FF.5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1,912,400,000	0	1,879,210,496	32,778,968	1,911,989,464	99.98 %	410,536
BMA	Data dan Informasi Publik	1,912,400,000	0	1,879,210,496	32,778,968	1,911,989,464	99.98 %	410,536
BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1,817,480,000	0	1,793,240,496	24,128,968	1,817,369,464	99.99 %	110,536
051	Inventarisasi Hutan Nasional	1,817,480,000	0	1,793,240,496	24,128,968	1,817,369,464	99.99 %	110,536
051.0A	Enumerasi (6 Kalster)	498,180,000	0	494,004,640	4,174,000	498,178,640	100.00	1,360
051.0B	RE-Enumerasi (24 Klaster)	1,319,300,000	0	1,299,235,856	19,954,968	1,319,190,824	99.99 %	109,176
BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	94,920,000	0	85,970,000	8,650,000	94,620,000	99.68 %	300,000
051	Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	94,920,000	0	85,970,000	8,650,000	94,620,000	99.68 %	300,000
051.0A	Cek Lapangan hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang (RM)	94,920,000	0	85,970,000	8,650,000	94,620,000	99.68 %	300,000
FF.6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	2,859,826,000	0	1,700,933,542	1,158,829,156	2,859,762,698	100.00	63,302
BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	2,859,826,000	0	1,700,933,542	1,158,829,156	2,859,762,698	100.00	63,302
BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2,859,826,000	0	1,700,933,542	1,158,829,156	2,859,762,698	100.00	63,302
051	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	2,859,826,000	0	1,700,933,542	1,158,829,156	2,859,762,698	100.00	63,302
051.0A	VERIFIKASI PNPB PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	213,956,000	0	210,540,000	3,416,000	213,956,000	100.00	0
051.0B	VERIFIKASI PNPB PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	942,494,000	0	883,810,000	58,684,000	942,494,000	100.00	0
051.0C	Verifikasi PNPB (ABT-PKH)	286,802,000	0	107,459,030	179,328,462	286,787,492	99.99 %	14,508
051.0D	Kegiatan Evaluasi Lapangan Persetujuan Penggunaan Kawasan	828,510,000	0	443,096,000	385,412,000	828,508,000	100.00	2,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



# LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2024

Kementerian : 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : 06 DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Satuan Kerja : 145160 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

Hal 3 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0D Hutan (ABT - PKH)	828,510,000	0			828,508,000	100.00	2,000
051.0E Evaluasi PKH Desk Analisis(12 Lokasi)	341,160,000	0	26,400,000	314,760,000	341,160,000	100.00	0
051.0F Koordinasi Kegiatan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	246,904,000	0	29,628,512	217,228,694	246,857,206	99.98 %	46,794
WA Program Dukungan Manajemen	8,410,958,000	0	7,503,658,059	905,231,466	8,408,889,525	99.98 %	2,068,475
WA.5432 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	8,410,958,000	0	7,503,658,059	905,231,466	8,408,889,525	99.98 %	2,068,475
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,578,558,000	0	6,671,258,059	905,231,466	7,576,489,525	99.97 %	2,068,475
EBA.962 Layanan Umum	700,000,000	0	572,629,515	127,277,484	699,906,999	99.99 %	93,001
059 Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL	700,000,000	0	572,629,515	127,277,484	699,906,999	99.99 %	93,001
059.0A Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	27,252,000	0	27,249,146	0	27,249,146	99.99 %	2,854
059.0B Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	34,790,000	0	34,787,098	0	34,787,098	99.99 %	2,902
059.0C Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	41,388,000	0	41,386,160	0	41,386,160	100.00	1,840
059.0D Pengelolaan kepegawaian	67,708,000	0	67,707,857	0	67,707,857	100.00	143
059.0E Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	465,871,000	0	363,519,992	102,269,184	465,789,176	99.98 %	81,824
059.0F Pembangunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	25,010,000	0	0	25,008,300	25,008,300	99.99 %	1,700
059.0G Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM lingkup Ditjen PKTL	37,981,000	0	37,979,262	0	37,979,262	100.00	1,738
EBA.994 Layanan Perkantoran	6,878,558,000	0	6,098,628,544	777,953,982	6,876,582,526	99.97 %	1,975,474
001 Gaji dan Tunjangan	5,448,381,000	0	4,828,018,277	618,451,930	5,446,470,207	99.96 %	1,910,793
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5,448,381,000	0	4,828,018,277	618,451,930	5,446,470,207	99.96 %	1,910,793
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,430,177,000	0	1,270,610,267	159,502,052	1,430,112,319	100.00	64,681
002.0A Perawatan Kendaraan Roda 4	129,168,000	0	120,726,772	8,441,000	129,167,772	100.00	228
002.0B Perawatan Kendaraan Roda 2	8,682,000	0	8,582,000	100,000	8,682,000	100.00	0
002.0C Langganan Daya dan Jasa	275,884,000	0	233,696,599	42,133,452	275,830,051	99.98 %	53,949
002.0D Operasional Satker	720,677,000	0	614,824,196	105,849,800	720,673,996	100.00	3,004
002.0E Perawatan Gedung Kantor dan Jaringan	16,825,000	0	15,281,700	1,543,300	16,825,000	100.00	0
002.0F Perbaikan Peralatan Kantor	9,441,000	0	7,999,000	1,434,500	9,433,500	99.92 %	7,500

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 029

Unit Organisasi : 06

Satuan Kerja : 145160

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

Hal 4 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0G Sewa Kantor	269,500,000	0	269,500,000	0	269,500,000	100.00	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	832,400,000	0	832,400,000	0	832,400,000	100.00	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal	832,400,000	0	832,400,000	0	832,400,000	100.00	0
051 pengadaan kendaraan bermotor	722,800,000	0	722,800,000	0	722,800,000	100.00	0
051.0A Kendaraan Bermotor	722,800,000	0	722,800,000	0	722,800,000	100.00	0
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	109,600,000	0	109,600,000	0	109,600,000	100.00	0
053.0A Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	109,600,000	0	109,600,000	0	109,600,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir